**Bab VII**

**Kebijakan Umum dan**

**Program Pembangunan Daerah**

Dalam bagian ini diuraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisi arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi yang dipilih dengan target capaian indikator kinerja, sehingga akan menjadi jelas hubungan antara program pembangunan daerah dengan indikator kinerja yang dipilih.

**7.1 Kebijakan Umum**

Kebijakan Umum disini adalah arah kebijakan untuk memberikan arah perumusan rencana program prioritas pembangunan dan menjadi pedoman bagi SKPD dalam menyusun program dan kegiatan Renstra SKPD.

Kebijakan umum pada hakekatnya merupakan arah kebijakan pembangunan yang dipilih dengan target indikator kinerja beserta program unggulan menurut urusan. Dengan demikian, kebijakan umum dan program unggulan yang disampaikan dalam RPJMD ini hanya yang bersifat prioritas, sementara untuk kebijakan umum dan program yang terkait penyelenggaraan Standar Pelayanan Minimum (SPM) maupun operasional pemerintahan dituangkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

**7.2 Program Pembangunan Daerah**

Program pembangunan daerah secara umum terbagi dalam 3 (tiga) jenis program, yaitu program kewilayahan, program lintas SKPD dan program SKPD.

Program kewilayahan, merupakan program pembangunan daerah untuk terciptanya keterpaduan, keserasian, keseimbangan laju pertumbuhan dan keberlanjutan pembangunan antar wilayah/antar kawasan dalam kecamatan di wilayah kabupaten/kota atau antar kabupaten/kota di wilayah provinsi atau dengan provinsi lainnya berdasarkan rencana tata ruang wilayah.

Program lintas SKPD, merupakan program yang melibatkan lebih dari satu SKPD untuk mencapai sasaran pembangunan yang ditetapkan termasuk indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Program SKPD, merupakan program yang dirumuskan berdasarkan tugas dan fungsi SKPD yang memuat indikator kinerja, lokasi program, tahun pelaksanaan, dan sumber daya yang diperlukan.

Tabel 7.1

Strategi, Arah Kebijakan, Indikator, Capaian Kinerja, Program, Bidang Urusan dan SKPD Penanggung Jawab

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Pelaksanaan kegiatan keagamaan, pengawasan perilaku, sanksi, dan pelibatan masyarakat dalam peningkatan kualitas akhlak dan moral aparatur | Mewajibkan instansi Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan keagamaan, menyusun pedoman pemberian sanksi, operasi rutin PNS di tempat-tempat hiburan dan membuka kota pengaduan masyarakat terhadap perilaku PNS | kasus / 1000 PNS | 9/1000 | 3/1000 | Program Peningkatan Kualitas Religius Aparatur | Otonomi Daerah | BK.Diklat |
| Peningkatan pemberian bantuan kepada sarana peribadatan melalui hibah dan bansos serta kegiatan keagamaan | Meningkatkan pemahaman pengurus mesjid atau RW terhadap mekanisme hibah dan bansos serta pelibatan pengurus mesjid dalam kegiatan perayaan hari-hari besar keagamaan | Rasio sarana dan prasarana peribadatan yang memperoleh bantuan dibandingkan dengan jumlah sarana dan prasarana peribadatan seluruhnya | 70% | 90% | Program Peningkatan Kualitas Sarana Peribadatan | Otonomi Daerah | Sekretariat Daerah |
| Pembinaan kepada generasi muda dalam lomba bidang keagamaan, pelaksanaan lomba | Pembinaan Keagamaan kepada generasi muda dalam bentuk lomba dan festival keagamaan berjenjang dari tingkat kelurahan hingga kota | prestasi 3 besar tingkat propinsi | peringkat 9 tingkat propinsi | 3 besar tingkat Propinsi | Program Peningkatan Kompetisi Keagamaan | Otonomi Daerah | Sekretariat Daerah |
| Peningkatan frekuensi dialog forum kerukunan umat beragama | Meningkatkan frekuensi dialog dalam rangka evaluasi kerukunan umat beragama | Kasus bernuansa SARA | 0 kasus | 0 kasus | Program Kerukunan Umat Beragama | Otonomi Daerah | Kesbangpol |
| Meningkatkan kompetensi aparatur pemerintah daerah | Meningkatkan kompetensi aparatur melalui peningkatan keahlian dan keterampilan | Rasio Aparatur yang menduduki jabatan struktural yang sebelumnya telah mengikuti diklatpim | 60 % | 90 % | Program Pendidikan Kedinasan | Otonomi Daerah | BK.Diklat |
|  | Mengembangkan sistem kesejahteraan PNS berdasarkan penilaian kinerja serta memenuhi kebutuhan aparatur baik fungsional dan non fungsional sesuai dengan standar kebutuhan | Tersedianya 1 sistem kesejahteraan pegawai | 0 % | 100% | Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur | Otonomi Daerah | BK.Diklat |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Penerapan reward dan punishment dalam disiplin PNS | Melakukan pembinaan disiplin PNS secara berkala, penerapan reward dan punishment, pengawasan disiplin, dan kotak pengaduan masyarakat | Menurunnya 20% kasus pelanggaran disiplin/  1000 PNS | 50 Kasus | 3 Kasus | Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur | Otonomi Daerah | BK.Diklat |
| Optimalisasi pengelolaan aset daerah | Melakukan penataan pengelolaan aset daerah dengan peningkatan kualitas kelembagaan aset, integrasi sistem, dan pemanfaatan aset daerah dengan pihak ketiga | Kejelasan lembaga pengelola aset, terlaksananya integrasi sistem, dan jumlah kerjasama | Tidak jelas menjadi tupoksi skpd mana | Tersedianya lembaga pengelola aset, terlaksananya integrasi sistem, dan jumlah kerjasama..... MOU | Program Optimalisasi Pengelolaan Aset Daerah | Otonomi Daerah | Sekretariat Daerah |
| Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel | Meningkatkan optimalisasi perencanaan, penganggaran, penatausahaan keuangan daerah | Peningkatan PAD …% APBD tepat waktu 100%, dan transparansi APBD/Publikasi 100% | Peningkatan PAD /thn. APBD tepat waktu, dan transparansi APBD/Publikasi | Peningkatan PAD 15% /thn. APBD tepat waktu 100%, dan transparansi APBD/Publikasi 100 % | Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah | Otonomi Daerah | DPPKD |
| Optimalisasi pengawasan dan pengendalian keuda | Meningkatkan peran Aparat Pengawasn Intern Pemerintah (APIP) dan optimalisasi Sistem Pengawasan Intern Pemerintah (SPIP) | Menurunnya jumlah atau nilai temuan hasil pemeriksaan | 94 temuan | 70 temuan | Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH | Otonomi Daerah | Inspektorat |
|  |  | Meningkatnya rasio tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan dengan jumlah SKPD | 23 org | 43 org | Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan | Otonomi Daerah | Inspektorat |
| Pelaksanaan proses perencaaan tepat waktu sesuai dengan ketentuan | Menyepakati jadwal waktu perencanaan dan penganggaran antara eksekutif dan legislatif serta mempublikasikannya | Penjabaran program RPJMD ke dalam program RKPD (jumlah program RKPD tahun berkenaan / jumlah program RPJMD yg harus dilaksanakan tahun berkenaan X 100 % | 60 % | 100% | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
| Peningkatan kualitas dokumen perencanaan SKPD | Meningkatkan kapasitas dan kemampuan aparatur perencana di setiap SKPD | Rasio perencana bersertifikat / jumlah aparatur perencana | 0 % | 50 % | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
| Mengoptimalkan sistem perencanaan dan pembangunan daerah | Tersedianya sistem perencanaan pembangunan daerah | 25% | 100% | Program Pengembangan Data/Informasi Perencanaan | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Peningkatan kualitas pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah | Publikasi hasil serta pembangunan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan daerah | Fasilitasi penyelesaian permasalahan saat pelaksanaan kegiatan | 80% | 100% | Program Pengendalian Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
|  |  | Rasio realisasi program dan kegiatan / rencana program dan kegiatan dalam RKPD | 70% | 100% | Program Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
| Penyediaan arsip dalam bentuk digital | Meningkatnya arsip vital dan arsip statis dari 530 arsip menjadi 1.060 arsip | Jumlah arsip vital dan statis | 530 arsip | 1060 arsip | Program Perbaikan sistem administrasi kearsipan | Kearsipan | Bapusipda |
| Peningkatan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | Melakukan pembinaan dan pemberian penghargaan kepada SKPD yang tertib arsip | Rasio SKPD yang tertib administrasi kearsipan / jumlah SKPD | 4 % atau 3/70 | 20 % atau 15/70 | Program Peningkatan kualitas pelayanan informasi | Kearsipan | Bapusipda |
| Optimalisasi kelembagaan pelayanan perijinan yang dilaksanakan dengan mudah, murah dan cepat sesuai dengan azas dan prinsip pelayanan | Penataan dan penguatan kelembagaan pelayanan perijinan, pembangunan sistem pelayanan perizinan online, dan penerapan insentif dan disinsentif informasi | Penambahan Jumlah Kewenangan Perizinan, tersedianya sistem dan tersedianya dasar hukum penerapan insentif dan disinsentif investasi | 22 | 50 | Program penataan dan pelayanan perijinan | Penanaman Modal | BPMPP |
| Peningkatan iklim invetasi yang kondusif | Meningkatkan kerjasama investasi | Jumlah kerjasama investasi | 2 kerjasama/ tahun | 2 kerjasama/ tahun | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Penanaman Modal | BPMPP |
|  | Meningkatkan kebijakan perencanaan pengembangan penanaman modal | Meningkatnya nilai investasi PMA dan PMDN | PMA 212.574.000.000 PMDN 380.825.698.000 | PMA 400.000.000.000 PMDN 600.000.000.000 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan realisasi invstasi | Penanaman Modal | BPMPP |
| Optimalisasi pengembangan pelayanan administrasi kependudukan | Meningkatkan pelayanan Administrasi kependudukan | Cakupan penerbitan KTP dan KK | 73.45% dan 100% | 100% dan 100% | Program pendaftaran penduduk | Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|  |  | Cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran dan kematian | 89.66% | 100 % | Program pelayanan pencatatan sipil | Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
|  |  | Menurunnya tingkat selisih data dasar kependudukan | 10 % | 5 % | Program Sistem Informasi Administrasi Kependudukan | Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  |  | Tersedianya pedoman/ arahan kebijakan kependudukan 100% | 100% | 100% | Program perencanaan kebijakan kependudukan | Kependudukan | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| Pengembangan struktur organisasi dan tata laksana yang akuntabel | Melakukan penataan kebutuhan organisasi dan sumberdaya aparatur berdasarkan prinsip good governance | Jumlah SKPD yang disusun kebijakan peta jabatan, standar kompetensi, ketatalaksanaan 100% di 2018 | 20% | 100% | Program Penataan Kelembagaan | Otonomi Daerah | Sekretariat Daerah |
| Peningkatan intensitas komunikasi masyarakat dengan pemerintah | Meningkatkan komunikasi masyarakat dengan pemerintah melalui forum-forum silaturahmi | Frekuensi penyelenggaraan forum-forum silaturahmi | 5 Kali/tahun | 12 kali/tahun | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, dan Media Massa | Komunikasi dan Informatika | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
|  |  | Rasio SDM yang memiliki sertifikat atau dilatih / jumlah aparatur bidang kominfo | 10 % | 50 % | Program Fasilitasi Peningkatan SDM Bidang Komunikasi dan Informasi | Komunikasi dan Informatika | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| Pembangunan komunikasi dalam rangka penyelesaian batas daerah dengan Kabupaten Cirebon | Menyelesaikan penegasan batas daerah antara Kota Cirebon dan Kabupaten Cirebon | Terwujudnya kesepakatan seluruh titik koordinat Pilar Batas Utama (PBU) | 8 titik | 8 titik | Program Pembinaan Pemerintahan | Otonomi Daerah | Sekretariat Daerah |
| Peningkatan dan pengembangan sistem informasi yang terintegrasi | Mengelola infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi yang sesuai dengan prosedur-prosedur yang ditetapkan, membangun pustaka insfrastruktur teknologi informasi, membangun pusat data (data center) yang terintegrasi antar instansi, Membangun sistem informasi sesuai dengan standar pengembangan dan penerapan egoverment | Tersedianya sistem informasi | 15 Sistem | 17 sistem | Program Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi | Komunikasi dan Informatika | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| Penyediaan fasilitasi pemahaman wawasan kebangsaan | Meningkatkan peran lembaga SKPD/kecamatan/ Kelurahan dalam sosialisasi wawasan kebangsaan | Rasio jumlah PNS, pelajar dan mahasiswa yg memperoleh pembinaan | 6 % | 30 % | Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | Kantor Kesbang Linmas |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Peningkatan peranserta masyarakat dalam keamanan dan ketertiban masyarakat | Meningkatkan jumlah kader masyarakat sadar hukum | rasio kader masyarakat bidang kesbangpol | 1org/RW | 5org/RW | Program Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | Kantor Kesbang Linmas |
|  | Mengintensifkan kegiatan siskamling serta memberikan reward kepada masyarakat dalam kegiatan siskamling | Jumlah RW yg melaksanakan siskamling | 10 % | 50% | Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | Kantor Kesbang Linmas |
| Peningkatan kerjasama dan kemitraan dalam pengendalian ketertiban umum | Mengintensifkan patroli dan cegah tangkal gangguan Kantrantibmas | Lokasi rawan trantibum | 1 kali | 3 kali | Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat) | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | Kantor SatPol PP |
| Peningkatan intensitas kegiatan kepemudaan di lokasi rawan ketertiban umum | Pembinaan kerohanian bagi pemuda di lokasi rawan ketertiban umum | Rasio pemuda yg dilatih / jumlah usia muda di lokasi | 0 % | 5 % | Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan | Pemuda dan Olahraga | Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda, dan olahraga |
|  | Penyaluran minat dan bakat terhadap pemuda di lokasi rawan ketertiban umum | Rasio pemuda yang dilatih / jumlah usia muda di lokasi | 0 % | 5 % | Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda | Pemuda dan Olahraga | Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda, dan olahraga |
| Peningkatan penanganan potensi pelanggaran Perda | Pemberdayaan masyarakat dan aparatur dalam sosialisasi dan penerapan perda | Penurunan jumlah kasus tingkat pelanggaran Perda trantibum | 10 kasus | 5 kasus | Program Penegakan Peraturan Daerah | Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri | Kantor SatPol PP |
| Penilaian K-3 tingkat RW | Meningkatkan peran lembaga kelurahan dalam bermitra dengan masyarakat | Rasio RW K3 | 10 % | 50 % | Program RW Bersih | Pemberdayaan Masyarakat | Kelurahan, Kecamatan, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| Optimalisasi rekayasa,sosialisasi dan pengendalian lalu lintas dalam rangka mengurai titk rawan kemacetan dan kecelakaan | Melakukan manajemen rekayasa lalu lintas, pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Terwujudnya keamanan, ketertiban, kenyamanan dan kelancaran berlalulintas | 75 % | 100 % | Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas | Perhubungan | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| Mengoptimalkan standar keselamatan lalu lintas | Menerapkan standar pengujian kendaraan bermotor | Tersedianya sarana dan fasilitas LLAJ yang memadai | 60 | 100 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Perhubungan | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  |  | Menurunnya tingkat kecelakaan karena kondisi teknis dan laik jalan kendaraan | 60 | 100 | Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor | Perhubungan | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| Peningkatan Keselamatan Pelayaran | Meningkatkan keselamatan pelayaran | Menurunnya kasus kecelakaan pelayaran | 60 | 100 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Keselamatan Pelayaran | Perhubungan | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| Menata sistem perparkiran yang sudah ada serta Menyediakan fasilitas parkir pada lokasi terpilih | Penerapan/perubahan geometris sistem parkir, Penerapan sistem perparkiran terpadu, parkir diluar badan jalan (off street) serta Menyediakan taman parkir di pusat-pusat kegiatan dan melakukan kerjasama dengan pihak ketiga dalam rangka penyediaan fasilitas gedung parkir | Terwujudnya perparkiran yang tertib dan aman | 60 | 100 | Program Peningkatan Pelayanan Parkir | Perhubungan | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
| Identifikasi, pembinaan dan pendampingan usaha bagi PKL serta penyediaan ruang bagi PKL | Melakukan pendataan dan pendaftaran PKL, serta pemberdayaan PKL melalui pembinaan dan bimbingan teknis, fasilitasi akses permodalan, penguatan kelembagaan, peningkatan jaringan dan promosi pemasaran serta penyediaan ruang bagi PKL | Rasio PKL yang menempati lokasi yang telah ditetapkan | 70 % | 40 % | Program Pembinaan Pedagang Kakilima dan Asongan | Perdagangan | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM |
|  |  | Rasio PKL yg dibina / jumlah PKL yg terdata | 0 % dari PKL terdaftar | 100% 0 % dari PKL terdaftar |  |  | Disperindag UMKM |
|  |  | Jumlah Kawasan Peruntukan bagi PKL | 0 | 5 |  |  | Disperindag UMKM |
| Penyediaan sarana dan prasarana penanggulangan bencana | Menyediakan sarana dan prasarana penanggulangan bencana di lokasi rawan bencana | Meningkatnya rasio penanganan kasus kebakaran tidak lebih 15 menit sampai ke lokasi | 14 % | 35% | Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana |  | Kantor Penangulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
| Peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur dan masyarakat terhadap tanggap darurat bencana | Memberikan bimbingan teknis tanggap darurat bencana di tingkat kelurahan dan kecamatan | Jumlah aparatur dan masyarakat di tingkat Kelurahan yang dilatih 300 orang /tahun | 600 org | 2100 org | Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran | Perumahan | Kantor Penangulangan Bencana dan Pemadam Kebakaran |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Penyusunan kebijakan tanggap darurat bencana | Membuat regulasi mitigasi bencana dan Strategi Ketahanan Kota | Tersedianya Peraturan tentang Mitigasi Bencana | Dokumen | Dokumen | Program Perencanaan, Pengendalian dan Penanggulangan Bencana | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
| Pemberian kesempatan kepada usia sekolah mengikuti pendidikan sesuai jenjangnya | Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan 12 Tahun melalui BOP, Penyediaan Buku Mata Pelajaran dan LKS serta sarana prasarana pendidikan dan Beasiswa bagi siswa Berprestasi | Indeks kepuasan Layanan | 40% | 85 % | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|  |  | APK SD | 100% | 100% | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|  |  | APM SD | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | Angka Putus Sekolah SD | 0.02% | 0% |  |  |  |
|  |  | APK SMP | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | APM SMP | 89.66% | 100% |  |  |  |
|  |  | Angka Putus Sekolah SMP | 0% | 0% |  |  |  |
|  |  | APK SMA | 80.30% | 100% | Program Pendidikan Menengah | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|  |  | APM SMA | 56.84% | 100% |  |  |  |
|  |  | Angka Putus Sekolah SMA | 0.02 | 0% |  |  |  |
|  |  | APK SMK | 61.34% | 100% | Program Pelayanan Pendidikan SMK | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|  |  | APM SMK | 43.48% | 100% |  |  |  |
|  |  | Angka Putus Sekolah SMK | 1.43% | 0% |  |  |  |
|  |  | Rasio siswa miskin yang mendapat pendidikan | 95% | 100% | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|  | Meningkatkan Penyelenggaraan Pendidikan Luar Sekolah | Penyelenggaraan Paket A dan B tiap kelurahan | 20 orang pada 2 kelurahan | 50 orang pada 22 kelurahan | Program Pendidikan Non Formal | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|  |  |  | 236 org pada 13 kelurahan | 250 org pada 15 kelurahan |  |  |  |
| Peningkatan mutu tenaga pendidik | Meningkatkan mutu penyelenggaraan guru dan tenaga kependidikan pendidikan dasar dan menengah | Kualifikasi akademik S-1/D-4 dan sertifikasi tenaga kependidikan SD/MI | Akademik 74.39%  Sertifikasi  48.05% | Akademik  100%  Sertifikasi  92% | Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  |  | Kualifikasi akademik S-1/D-4 dan sertifikasi tenaga kependidikan SMP/MTs | Akademik 88.82%  Sertifikasi  52.14% | Akademik  100%  Sertifikasi  77% |  |  |  |
|  |  | Kualifikasi akademik S-1/D-4 dan sertifikasi tenaga kependidikan SMA/SMK/MA | Akademik  93.66%  Sertifikasi  48.49% | Akademik  100%  Sertifikasi  82% |  |  |  |
| Pengembangan pendidikan non formal dan informal | Mengembangkan kawasan percontohan pendidikan nonformal dan informal ditingkat RW | Pengembangan lembaga PAUDNI | 188 PAUD di 135 RW | 247 PAUD di 247 RW | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
|  | Mengembangkan kawasan percontohan perpustakaan ke tingkat RW dan Kelurahan | Perpustakaan tingkat RW | 1 Perpus RW pada 1 Kelurahan | 6 Perpus RW pada 5 Kelurahan | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Kearsipan | Bapusipda |
|  | Meningkatkan jumlah SKPD yang tertib administrasi kearsipan | Rasio jumlah SKPD yang tertib kearsipan | 3/70 | 18/70 | Program Perbaikian Sistem Administrasi Kearsipan | Kearsipan | Bapusipda |
| Pemberdayaan masyarakat berperilaku hidup bersih dan sehat | Mengembangkan kawasan percontohan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat disemua tatanan kehidupan (Rukun Warga, Sekolah, Perkantoran, Tempat tempat Umum) | Kelurahan siaga aktif | 42% | 75% | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|  | Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih Sehat di masyarakat | Jumlah KK ber PHBS | 54.8% | 75% | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Peningkatan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas | Menyediakan jaminan pelayanan kesehatan dasar bagi seluruh warga Kota Cirebon | Cakupan pelayanan Bumil | 88.47% | 95% | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|  |  | Cakupan kunjungan Bumil | 89.97% | 95% |  |  |  |
|  |  | Cakupan penjaringan kesehatan siswa SD dan setingkat | 100% | 100% |  |  |  |
|  |  | Cakupan pelayanan kesehatan dasar Gakin | 90.78% | 100% |  |  |  |
|  |  | Penyelidikan Epidemiologi pada Kelurahan potensi KLB | 42% | 75% | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|  |  | Penemuan AFP | 9 kasus | >= 3 kasus |  |  |  |
|  |  | Kesembuhan TB Paru BTA+ | 83.14% | > = 85 % |  |  |  |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Peningkatan pelayanan kesehatan rujukan yang berkualitas | Menyediakan Biaya Operasional Pelayanan Kesehatan Rujukan | Cakupan pelayanan kesehatan rujukan Gakin 100% | 100% | 100% | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|  | Meningkatkan Pelayanan Kesehatan Lanjutan | Cakupan pelayanan gawat darurat level 1 yang harus diberikan sarana kesehatan RS | 100% | 100% | Program Pelayanan Kesehatan Lanjutan | Kesehatan | RSUD Gn .Jati |
|  | Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan rujukan khusus Kelas III | Tingkat kepuasan pelayanan kelas III | 25% | 75% | Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata | Kesehatan | RSUD Gn .Jati |
| Pengendalian kelahiran | Mengendalikan kelahiran dan pendewasaan perkawinan | Meningkatkan peserta KB baru | 100%  (3200 akseptor) | 100%  (3400 akseptor) | Program Keluarga Berencana | Keluarga Berencana | BPMKBPP |
|  |  | Meningkatnya usia kawin pertama wanita | 19 tahun | 21 tahun | Program Keluarga Berencana | Keluarga Berencana | BPMKBPP |
| Pembinaan atlit berpestasi | Melakukan pembinaan atlit berprestasi melalui pembibitan sejak dini dan pemberian penghargaan | Peringkat Propinsi | Peringkat 14 propinsi | Pringkat 10 besar Propinsi | Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga | Pemuda dan Olahraga | Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda, dan olahraga |
| Pengembangan fasilitas sarana dan prasarana olah raga | Mengembangkan fasilitas sarana dan prasarana olah raga | Kawasan Olah Raga Bima siap pakai 100% di tahun 2018 | 0% | 100% | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Pemuda dan Olahraga | Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda, dan olahraga |
| Penetapan kalender budaya | Melakukan pembinaan aktivitas sanggar seni serta meningkatkan event pagelaran budaya khas Cirebon | Rasio kelompok sanggar seni yang aktif | 30% | 35% | Program pengelolaan keragaman budaya | Pemuda dan Olahraga | Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda, dan olahraga |
| Penataan bangunan cagar budaya serta revitalisasi pusaka cagar budaya | Melakukan penataan /revitalisasi bangunan cagar budaya, pemberdayaan masyarakat dalam pelestarian pusaka cagar budaya, dan kerjasama dengan pemilik cagar budaya dalam upaya pelestarian | Rasio bangunan cagar budaya yang terpelihara | 5 % | 25% | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Kebudayaan | Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda, dan olahraga |
|  |  | Rasio bangunan cagar budaya (Keraton) yang terevitalisasi di Kota Cirebon | 10 % | 30% |  |  |  |
|  |  | jumlah pemilik cagar budaya yang bersedia bekerjasama | 10 % | 50% |  |  |  |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Peningkatan pemberdayaan ekonomi masyarakat dengan TRIBINA (Manusia, Usaha dan Lingkungan) | Meningkatkan pembinaan teknis dan manajemen terhadap koperasi dan UMKM | Rasio koperasi dan UMKM yang dibina | 10 % | 50 % | Program pengembangan sistim pendukung usaha bagi usaha mikro kecil menengah | Koperasi dan UKM | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM |
|  | Meningkatlan fasilitasi permodalan antara UMKM/koperasi dengan lembaga keuangan | jumlah UMKM aktif dalam peningkatan modal yang dimiliki | 0%  (10.228jt) | Naik 15 % (11.831jt) | Program pengembangan kewirausahawan dan keunggulan kompetitif usaha kecil menengah | Koperasi dan UKM | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM |
|  |  | jumlah koperasi aktif | 0% (635.150jt) | Naik 15 % (730.423jt) | Program peningkatan kualitas kelembagaan koperasi | Koperasi dan UKM | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM |
| Peningkatan kualitas keterampilan tenaga kerja | Meningkatkan kompetensi BLK | standar BLK | Non akreditasi | Tipe C | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | Ketenagakerjaan | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
|  | Melaksanakan pelatihan keterampilan kerja yang berorientasi pada penempatan langsung | Jumlah tenaga kerja terlatih | 0% | 20% | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Ketenagakerjaan | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
|  |  | Jumlah pekerja/buruh yang menjadi peserta jamsostek | 32.14% | 50% | Program Pewrlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan | Ketenagakerjaan | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| Peningkatan sistem distribusi, stabilisasi dan cadangan pangan | Mengembangkan sistem distribusi pangan yang efektif dan efisien untuk menjamin stabilitas pasokan dan harga pangan | ketersediaan energi dan protein perkapita | 87%  (1.914 kl/kal/hari) | 90%  (1.980 kl/kal/hari) | Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan | Ketahanan Pangan | Kantor Ketahanan Pangan |
|  |  | Penguatan cadangan pangan | 50% | 60% | Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan | Ketahanan Pangan | Kantor Ketahanan Pangan |
|  |  | Ketersediaan informasi pasokan, harga, dan akses pangan di daerah | 80% | 90% | Prog. Peningkatan Ketahanan Pangan | Ketahanan Pangan | Kantor Ketahanan Pangan |
|  |  | Stabilitas harga dan pasokan pangan | 80% | 90% | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Ketahanan Pangan | Kantor Ketahanan Pangan |
|  |  | Penanganan daerah rawan pangan | 50% | 60% | Program Peningkatan Ketahanan Pangan | Ketahanan Pangan | Kantor Ketahanan Pangan |
|  |  | peningkatan skor pola pangan harapan | 84% | 90% | Program Penganerkaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Kantor Ketahanan Pangan |
|  |  | Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan | 65% | 80% | Program Penganerkaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan | Ketahanan Pangan | Kantor Ketahanan Pangan |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  | Meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam mengoptimalkan sumberdaya yang dikuasainya untuk mewujudkan ketahanan pangan berkelanjutan | Terbangunnya Sub Terminal Agribisnis (STA) | Tidak tersedia | 1 unit | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/ Perkebunan, peternakan, dan perikanan; | Pertanian | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan |
|  |  | Terehabilitasinya lahan kritis / penghijauan kota | 74 ha | 49 ha | Program Rehabilitasi hutan dan lahan | Kehutanan | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan |
|  | Mengembangkan kemampuan pengelolaan cadangan pangan pemerintah dan masyarakat secara sinergi dan partisipatif | Meningkatnya produksi tanaman pangan dan hortikultura per hektare 3% tiap tahun | Padi 5.464 ton/ha  Palawija 434 ton/ha  Hortikultura 479 ton/ha | Padi 6.252 ton/ha  Palawija 9.260 ton/ha  Hortikultura 572 ton/ha | Prog. Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Pertanian | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan |
|  |  | Meningkatnya produksi dan hasil produksi peternakan (Ton/Ha) : 3%/Tahun | Rp. 69.893.570.000  (365.977 ton) | Rp. 80.377.605.500  (523.948 ton) | Prog. Peningkatan Produksi Peternakan | Pertanian | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan |
|  |  | Meningkatnya produksi perikanan tangkap 2%/Tahun | Rp. 599.133.670  (4.334 ton) | Rp. 659.047.037  (4.984 ton) | Prog. Peningkatan produksi perikanan tangkap | Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan |
|  |  | Meningkatnya produksi perikanan budidaya 2%/Tahun | Rp. 5.029.000.000  (226 ton) | Rp. 5.531.900.000  (260 ton) | Program peningkatan produksi perikanan budidaya | Kelautan dan Perikanan | Dinas Kelautan, Perikanan, Pertanian dan Peternakan |
| Peningkatan promosi wisata | Meningkatkan promosi wisata budaya khas cirebon melalui pengembangan ekonomi kreatif | Angka kunjungan wisata pertahun meningkat sebesar 5 % tiap tahun | 526.268  Orang | 639.683  Orang | Program pengembangan destinasi pariwisata | Pariwisata | Dinas Kebudayaan Pariwisata, pemuda, dan olahraga |
| Peningkatan ketepatan sasaran program penanggulangan kemiskinan | Menyediakan satu data keluarga miskin | Tersedianya Integrasi Data Keluarga Miskin | Belum tersedia | 1 data | Program satu data keluarga miskin | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
|  | Meningkatkan pengendalian dan pengawasan terhadap program-program penanggulangan kemiskinan | Fasilitasi penyelesaian permasalahan saat pelaksanaan kegiatan | 50% | 100% | Program pengendalian dan pengawasan penanggulangan kemiskinan | Perencanaan Pembangunan | Bappeda |
| Peningkatan akses pelayanan dasar bagi keluarga miskin | Menyediakan akses pelayanan pendidikan berupa Beasiswa rawan DO | Rasio siswa gakin yg memperoleh pendidikan / jumlah siswa gakin | 90% | 100% | Program peningkatan akses pendidikan bagi keluarga miskin | Pendidikan | Dinas Pendidikan |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  | Memberikan akses pendampingan pelayanan kesehatan rujukan | Rasio KK miskin yg memperoleh pendampingan pelayanan kesehatan rujukan | 100%  (13.395 kasus) | 100%  (24.523  kasus) | Program peningkatan akses pelayanan kesehatan, rujukan bagi keluarga miskin | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
|  | Menyediakan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin | Rasio KK miskin rata-rata yg memperoleh akses pelayanan / jumlah KK miskin | 10% | 30% | Program peningkatan akses pelayanan air bersih, sanitasi, dan listrik bagi keluarga miskin | Perumahan | Dinas PUPESDM |
|  | Menyediakan perbaikan rumah tidak layak huni dengan program bedah rumah | Rasio KK Miskin yg memperoleh bantuan perbaikan / jumlah KK miskin | 10% | 30% | Program bedah rumah bagi keluarga miskin | Perumahan | Dinas PUPESDM |
|  | Menyediakan akses pelayanan pangan dan gizi | Rasio Pemberian Makanan Pendamping ASI usia 6-24 bulan pada keluarga miskin | 18,5% | 50% | Program pelayanan akses pangan dan gizi bagi keluarga miskin | Kesehatan | Dinas Kesehatan |
| Pemberdayaan ekonomi keluarga miskin | Melaksanakan pelatihan, pembentukan kelembagaan ekonomi mikro berbasis mesjid, dan pendampingan usaha ekonomi keluarga miskin | lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid | 0 | 247 RW | Program pembentukan lembaga ekonomi mikro berbasis mesjid untuk keluarga miskin | Koperasi dan UKM | Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan UMKM |
| Peningkatan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak | Mengoptimalkan fungsi pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak | Penanganan Pengaduan | 0 % | 100% | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | Pemberdayaan Perempuan | BPMPPKB |
|  | Mengembangkan kawasan-kawasan percontohan Rukun Warga Layak Anak | Rasio RW layak anak per kelurahan | 1 / kota | 1 RW per Kelurahan | Program RW Layak Anak | Pemberdayaan Masyarakat | Kelurahan, Kecamatan, dan BPMPPKB |
| Penanganan PMKS | Mengoptimalkan fungsi panti-panti pelayanan sosial | Peningkatan keterampilan tenaga pengurus panti asuhan/jompo | 20% | 100% | Program Pembinaan Panti Asuhan/ Panti Jompo | Sosial | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
|  |  | Jumlah Potensi Sumber daya Kesejahteraan Sosial yang berpartisipasi dalam penanganan PMKS | 7 PSKS  7MOU | 12 PSKS 12MOU | Program Penguatan Jejaring kemitraan dalam rangka penanganan PMKS | Sosial | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
|  |  | PMKS yang memperoleh bantuan sosial untuk memenuhi kebutuhan dasar | 23.31% | 80% | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Sosial | Dinas Sosial dan Tenaga Kerja |
| Penyajian data terpilah | Meningkatkan peran dan keterwakilan Gender disetiap kegiatan pembangunan | Meningkanya Keterwakilan Gender 30 % pada kegiatan pembangunan | 50% | 100% | Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan | Pemberdayaan Perempuan | BPMPPKB |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Peningkatan kualitas hasil musrenbang kecamatan | Membentuk fasilitator musrenbang untuk tiap kelurahan dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian hasil musrenbang | Rasio fasilitator per kelurahan | 1 orang per kelurahan | 5 orang per kelurahan | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat | BPMPPKB |
| Memberikan reward terhadap partisipasi masyarakat | Melaksanakan kompetisi partisipasi masyarakat khususnya bantuan RW | Meningkatnya nilai partisipasi masyarakat / nilai bantuan RW | 45 % | 65 % | Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Kelurahan | Pemberdayaan Masyarakat | BPMPPKB |
| Peningkatan ruang terbuka hijau publik | Menambah RTH publik melalui pembebasan lahan baru atau memanfaatkan aset milik pemerintah | Luas kawasan RTH bertambah (ha) | 342,9 ha (9% luas kota) | 457,2 ha (12% luas kota) | Program Pengadaan Ruang Terbuka Hijau | Lingkungan Hidup | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| Peningkatan kualitas ruang terbuka publik dan privat dengan melibatkan peranserta masyarakat | Membangun taman, taman interaktif melalui pembangunan/pengembangan taman kota sebagai ruang publik penyaluran kreatifitas (creative public space) dan meningkatkan peran serta masyarakat | Pembangunan dan peningkatan taman publik | 39% | 80% | Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau | Lingkungan Hidup | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| Penataan dan penambahan luas pemakaman | melakukan inventarisasi luas pemakaman dan kebutuhan pemakaman, menambahan wilayah makam serta menata pemakaman dengan konsep ruang terbuka hijau | Luas areal permakaman bertambah 2 ha | 2.24 ha | 4.24 ha | Program Pengelolaan Areal Pemakaman | Perumahan | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| Penerapan instrumen pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan | Mengendalikan pencemaran lingkungan melalui penerapan ijin lingkungan, Pengawasan dan penegakan hukum lingkungan, penerapan teknologi ramah lingkungan dan tepat guna, uji emisi dan kadar polusi, penyediaan informasi SDA dan lingkungan, konservasi dan pelestarian fungsi atmosfer | Meningkatnya Pelayananan Pencegahan Pencemaran Air | 80 % | 100 % | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  |  | Meningkatnya pelayanan Pencegahan Pencemaran udara dari sumber tidak bergerak | 80 % | 100 % | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
|  |  | Meningkatnya pelayanan pengendalian B3 dan limbah B3 | 0 % | 3 % | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
|  |  | Meningkatnya kelengkapan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan | 46 % | 79 % | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
|  |  | Meningkatnya pelayanan informasi status kerusakan lahan dan atau tanah untuk produksi biomassa | 100 % | 100 % | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
|  |  | Mengembangkan sistem informasi lingkungan hidup | Tidak tersedia | 1 sistim informasi | Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Mengenai SDA dan LH | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
|  |  | Jumlah Green Office (SKPD) | 2 % | 100 % | Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
|  |  | Mewujudkan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup | 2 % | 54 % | Program Pengelolaan Lingkungan Berbasis Masyarakat | Lingkungan Hidup | Kantor Lingkungan Hidup |
| Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan | Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui peran serta masyarakat dan penyediaan sarana prasarana, kerjasama pelayanan persampahan serta penggalangan CSR | Meningkatnya volume sampah ditampung dan terangkut setiap hari | Ditampung 470 M3  Terangkut 700 M3 | Ditampung 470 M3  Terangkut 700 M3 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | Lingkungan Hidup | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
| Penerapan konsep 3R | Memanfaatkan sampah sebagai sumber daya mulai dari sumber/hulu melalui Pembangunan sentra 3R / Pusat Daur Ulang, Pendampingan pembentukan bank sampah di tingkat kelurahan, Pengembangan jejaring kerja bank sampah | 20 % RW zero waste | 4% | 20 % RW | Program Pengelolaan Sampah Berbasis 3R | Lingkungan Hidup | Dinas Kebersihan dan Pertamanan |
| Pengembangan prasarana jalan dan jembatan | Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas dan Kualitas Jaringan Jalan dan Jembatan serta penyediaan sistem informasi data base jalan dan jembatan | Tersedianya jalan yang menghubungkan pusat-pusat kegiatan dalam wilayah kota 100% | Jalan 90%  Jembatan 95% | Jalan 100%  Jembatan 100% | Program Pembangunan Jalan dan Jembatan | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
|  |  | Tersedianya Jalan yang memudahkan masyarakat perindividu melakukan perjalalan | 92% | 100% | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
|  | Mengembangkan sarana dan prasarana pendukung infrastruktur kota melalui Pengadaan alat berat dan alat angkut | Meningkatnya Rentribusi Alat Berat | Rp. 50jt 1 thn | Rp. 100jt 1 thn | Program Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Alat Berat | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| Pengembangan sarana dan prasarana drainase | Mengembangkan dan meningkatkan kapasitas sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder | Tersedianya system jaringan drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan | dari 30 cm , selama 2 jam dan lebih dari 2 kali setahun) | Tidak lebih dari 30cm , selama 2 jam dan tidak lebih dari 2 kali setahun) | Program Pembangunan Saluran Drainase Primer dan Sekunder | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| Pemeliharaan sarana prasarana drainase | Melaksanakan Pemeliharaan sarana dan prasarana drainase primer dan sekunder | Meningkatnya Kondisi saluran drainase primer dan sekunder dalam kondisi baik | 90% | 100% | Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase Primer dan Sekunder | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| Konservasi sumberdaya air | Menahan air permukaan selama mungkin di darat melalui pembangunan waduk/situ/embung, tangkapan air di hulu/sumur resapan dan lubang biopori serta konservasi air tanah | Meningkatnya media resapan | 3 ha | 10 ha | Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  |  | Terbangunnya kolam retensi/embung | 0 | 2 buah | Program Pengendalian Banjir | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| Pengembangan pengelolaan air limbah domestik sistem terpusat dan setempat | Meningkatkan cakupan layanan air limbah sistem terpusat melalui pembangunan perpipaan dan IPAL sistem terpusat serta mendorong pengolahan air limbah domestik permukiman melalui Pembangunan IPAL (Sanitasi) komunal, sosialisasi penggunaan septic tank standar lingkungan hidup, dan melalui pembangunan/peningkatan IPAL sistem setempat | Cakupan pelayanan air limbah | 92% | 100 % | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Limbah | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| Pengembangan dan peningkatan sistem air minum perpipaan dan non perpipaan | Mengembangkan sistem penyediaan air minum perpipaan melalui Peningkatan kualitas dan kuantitas air baku dari Cipaniis Kabupaten Kuningan ke Kota Cirebon serta sumber air baku lainnya | Meningkatnya cakupan pelayanan air bersih non perpipaan | 4 % | 20% | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| Penyediaan sumber air baku | Mengembangkan sumber air baku alternatif (Waduk Jati Gede) dan alternatif air baku lainnya untuk memenuhi kebutuhan air bersih perpipaan | Tersedianya alternatif baru penyediaan air baku | Belum tersedia | 1 alternatif | Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Baku | Pekerjaan Umum | Dinas PUPESDM |
| Pengembangan instrumen pengendalian pemanfaatan ruang yang efektif | Mewujudkan sistem integritas dalam perencanaan dan pengendalian pembangunan secara konsisten melalui pengawasan dan penindakan bagi pihak yang menyalahi dan melanggar aturan pemanfaatan ruang | Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan ijin pemanfaatan ruang selama 12 hari kerja dan terkendalinya pemanfaatan ruang | 100% | 100% | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Penataan Ruang | Dinas PUPESDM |
| **Strategi** | **Arah Kebijakan** | **Indikator Kinerja (outcome)** | **Capaian Kinerja** | | **Program Pembangunan Daerah** | **Bidang Urusan** | **SKPD Penanggung Jawab** |
| **Kondisi Awal** | **Kondisi Akhir** |
|  | Pemberian akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengetahui perencanaan, pengendalian dan pemanfataan ruang melalui sistem informasi, media cetak, media elektronik dan tempat tempat lain yang mudah diketahui | Tersedianya sistem informasi | Belum tersedia | 1 sistem | Program Penyediaan Sistem Informasi Pengendalian Tata Ruang | Penataan Ruang | Dinas PUPESDM |
| Penataan lingkungan kawasan permukiman kota | Menata lingkungan permukiman | berkurangnya kawasan lingkungan permukiman kumuh….% | 30% | 20% | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Perumahan | Dinas PUPESDM |
| Pengembangan rumah sehat sederhana | Menyediakan rumah sehat sederhana yang layak huni dan superblok rumah susun sewa dan milik yang murah (untuk mendekatkan tempat tinggal dengan tempat kerja) pada lokasi pasar, sarana kesehatan dan lainnya | Meningkatnya keluarga miskin mendapatkan bedah rumah | 10% | 30% | Program Pengembangan Perumahan | Perumahan | Dinas PUPESDM |
| Peningkatan Sarana dan Prasarana Serta Fasilitas Perhubungan | Membangun Sistem Angkutan Umum Massal, Meningkatkan kuantitas dan kualitas angkutan umum melalui Peremajaan armada bus sedang, Penambahan dan Penataan Trayek, Penataan tempat pemberhentian angkutan umum serta pelayaanan angkutan hari-hari besar | Cakupan Wilayah pelayanan angkutan umum | 60% | 100% | Program Peningkatan Pelayanan Angkutan | Perhubungan | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |
|  | Meningkatkan kualitas dan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, Pejalan Kaki, penyandang disabilitas dan pemakai sepeda | Ketersediaan fasilitas terminal, bandara, jembatan timbang, JPO, pejalan kali, dan fasilitas untuk penyandang disabilitas dan pemakai sepeda | 60% | 100% | Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan | Perhubungan | Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika |